

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Menurut (Harmawanto dkk, 2019).

Anggaran adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik yang menyangkut penerimaan maupun pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu, biasanya adalah satuan tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Adalah Pengelolaan keuangan Negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bangsa Indonesia (Luqyana & Islahuddin, 2022).

Kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan adalah sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan negara. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan

pertanggung jawaban dengan menggunakan sistem akuntansi yang di atur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bentuk bersifat seluruh pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintah daerah terdapat dua subsistem akuntansi, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Laporan keuangan OPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan OPD, oleh karena itu setiap OPD harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin. Untuk dapat membuat laporan keuangan yang baik dan bertanggung jawab pemerintah perlu menerapkan akuntansi berbasis akrual. Penerapan standar akuntansi pemerintah juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Instansi pemerintah mulai tahun 2015 harus menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yaitu berbasis akrual.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) laporan keuangan pokok menurut standar akuntansi pemerintahan adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintah mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah di lakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan

secara sistematis dan struktur pada satu periode pelaporan kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja.

Melalui penerapan standar akuntansi pemerintah akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan di tentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus di susun berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Namun, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual belum sepenuhnya efektif (Mamulati, 2022).

Selain SAP, faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian internal. Menurut Rahmawati dkk. (2018), pengendalian internal adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan jugmemiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar informasi pelaporan keuangan reliabel.

Standar ini diperlukan dalam proses penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan APBD dalam bentuk laporan keuangan. Namun laporan keuangan yang dihasilkan belum diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan

masih banyaknya instansi pemerintah yang laporan keuangannya masih terdapat beberapa temuan oleh audit, baik audit intern maupun audit ekstern.

Salah satu Kabupaten yang ada dilingkungan Provinsi Papua yang laporan keuangannya masih terdapat beberapa koreksi terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura. Untuk pengelolaan keuangannya pemerintah Kabupaten Jayapura sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, hal ini berdasarkan wawancara dengan kepala dinas keuangan dan aset daerah serta laporan keuangan pemerintah yang disusun pada tahun 2013 hingga tahun 2022. Penerapan SAP Nomor 71 ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura sehingganya tujuan dari laporan keuangan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna bagi pemakainya untuk pengambilan keputusan, untuk itu maka laporan keuangan wajib disusun berdasarkan SAP yang telah ditetapkan.

Untuk melihat kesesuaian laporan keuangan dengan standar maka dilakukan pemeriksaan atas laporan tersebut, maka dari itu laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jayapura dilakukan audit pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi dari laporan keuangan, selama 9 Tahun Anggaran terakhir yakni tahun anggaran 2013 -2022 memperoleh opini dari pihak BPK RI perwakilan Kota Jayapura menyatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Namun masih ada beberapa temuan signifikan terkait dengan kepatuhan pertaturan perundangundangan yang berlaku yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Penggunaan dana hibah dari BNPB untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana banjir bandang dan longsor senilai Rp53 Miliar dari Rp 275 Miliar pada September 2020 lalu oleh BNPB untuk membiayai kegiatan 16 OPD lingkup Pemkab setempat.
2. Permasalahan realisasi belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan kepada 58 orang pegawai yang tidak masuk kerja lebih dari 64 hari tahun 2020.
3. Pertanggungjawaban belanja bahan bakar minyak (BBM) pada Sekretariat Daerah Sebesar Rp. 220.000.000 pada tahun 2022.
4. Temuan rekomendasi di 10 OPD Pemerintah Kabupaten Jayapura terkait penggunaan keuangan yang tidak sesuai

Berdasarkan hasil audit ini masih terdapat beberapa item yang menjadi temuan karena sistem pencatatan yang belum sesuai dengan SAP PP Nomor 71, seperti piutang daerah yang tidak tertagih tapi belum dihapuskan dan pengeluaran daerah yang tidak sesuai peruntukannya serta investasi kemitraan dengan pihak ketiga belum dilakukan likuidasi hal ini menggambarkan pencatatan terhadap laporan keuangan yang belum tertata dengan baik.

Berdasarkan fakta-fakta dan fenomena-fenomena yang dijelaskan ini, maka peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini apakah:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah pemanfaatan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan pada laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura.
2. Mengetahui kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura.
3. Mengetahui manfaat penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti terutama untuk menambah wawasan dalam hal mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan

pada Pemerintah daerah serta menjadi suatu kesempatan yang berharga bagi peneliti untuk dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah di peroleh selama masa kuliah.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai dokumentasi di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan Universitas Cenderawasih serta dapat dikembangkan lebih luas dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini khususnya bagi pemerintah daerah yaitu sebagai informasi dan arahan yang baik, sehingga akan mendapatkan gambaran penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini maka dibuat susunan kajian berdasarkan metodologinya dalam bentuk sistematika penulisan yaitu :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang studi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : merupakan bab Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan tentang teori-teori, penelitian sebelumnya dan kerangka pikir/model penelitian yang melandasi dan berkaitan dengan penerapan standar

akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura.

BAB III : Merupakan bab metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari Lokasi Penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, pengukuran dan pengujian instrumen.

BAB IV: Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : Merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran